

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum berdirinya Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kabupaten Kendal, merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan struktur ekonomi yang dominan pada sektor agraris. Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kendal bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang cenderung menghasilkan pendapatan rendah dan tidak stabil (Budiani et al., 2022).

Sebelum berkembangnya sektor industri, perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, perkebunan, serta perikanan darat dan laut. Kondisi geografis dengan lahan subur di wilayah selatan dan akses ke Laut Jawa di bagian utara mendukung aktivitas masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil berbasis hasil alam. Namun, ketergantungan ini juga membuat pertumbuhan ekonomi daerah cenderung rentan terhadap perubahan musim maupun harga komoditas. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian seringkali tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan relatif tinggi.

Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada awal dekade 2010-an masih tergolong tinggi, yakni di atas 14%, meskipun secara bertahap terus mengalami penurunan hingga berada di bawah 10% menjelang 2020. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, meskipun masih menyisakan tantangan karena angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Kondisi ini menggambarkan

bahwa sebelum sektor industri berkembang pesat, upaya pengentasan kemiskinan di Kendal masih menghadapi keterbatasan dalam hal lapangan kerja, pendapatan masyarakat, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Hal ini mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat pada saat itu belum optimal, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup. Selain itu, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kendal tahun 2010 hanya sebesar Rp780.000, masih relatif rendah dan bahkan berada di bawah standar kebutuhan hidup layak. Rendahnya pendapatan dan kualitas sumber daya manusia ini menggambarkan keterbatasan daya beli masyarakat sebelum adanya transformasi ekonomi melalui sektor industri.

Sejak berdirinya KIK pada 2016, perkembangan ekonomi daerah mulai terlihat nyata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal terus mengalami kenaikan, dari 72,29 pada tahun 2020 menjadi 74,34 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kendal yang pada tahun 2024 mencapai Rp58,8 triliun, mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi yang semakin beragam. Kehadiran KIK juga berdampak pada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari Rp2,26 juta pada 2020 menjadi Rp2,78 juta pada 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Data ini menggambarkan bahwa kehadiran KIK berperan sebagai motor penggerak transformasi Kendal dari basis agraris menuju daerah industri yang lebih berdaya saing.

Menurut Budiani et al. (2022), sektor industri pengolahan di Kabupaten Kendal telah menjadi sektor unggulan yang ditunjukkan oleh nilai Location Quotient (LQ) lebih dari 1, menandakan daya saing tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB juga terus mengalami peningkatan sehingga menjadikannya sebagai penopang utama perekonomian daerah. Selain itu, peningkatan jumlah industri yang ada sejalan dengan pembangunan KIK yang berperan sebagai magnet investasi baru. Budiani et al. menjelaskan bahwa PDRB industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, dan upah minimum memiliki hubungan positif dan sangat kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini selaras dengan perkembangan IPM Kendal yang meningkat dari kategori sedang pada tahun 2010 menjadi kategori tinggi sejak tahun 2016, menggambarkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tidak terlepas dari peran sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan KIK tidak hanya merepresentasikan kerja sama internasional antara Indonesia dan Singapura, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah. Transformasi ekonomi yang terjadi di Kendal menunjukkan bagaimana investasi asing langsung (FDI), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana KIK berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1, yaitu Tanpa Kemiskinan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana hasil dari kerjasama internasional dalam pembangunan Kawasan Industri Khusus (KIK) dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1, yaitu pengentasan kemiskinan (No Poverty)?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk kerjasama internasional antara Indonesia, khususnya Kabupaten Kendal, dengan Singapura melalui pembangunan KIK dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pertama, yaitu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara pembangunan kawasan industri dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di tingkat lokal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang berdirinya KIK sebagai hasil kerjasama antara Indonesia dan Singapura, serta menganalisis peran aktor-aktor utama yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta seperti PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd. Penelitian ini juga berfokus pada penjelasan mengenai kontribusi investasi asing, khususnya Foreign Direct Investment (FDI), terhadap

pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak keberadaan KIK terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, serta kontribusinya dalam menekan angka kemiskinan masyarakat lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat akademis dalam pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya terkait teori Complex Interdependence yang digunakan untuk menganalisis kerja sama Indonesia–Singapura melalui KIK. Studi ini menambah literatur mengenai bagaimana investasi asing langsung (FDI) tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai peran aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional, dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, dan interdependensi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana keberadaan KIK mampu mendorong pembangunan daerah dan membantu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang tertarik untuk

memahami peran kerjasama internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kontribusi KIK terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai KIK telah banyak dilakukan, umumnya menyoroti dampak ekonomi, sosial, dan kebijakan yang muncul dari keberadaan kawasan ini. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji aspek peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta implikasi sosial lingkungan. Namun, kajian yang menekankan hubungan kerja sama internasional antara Indonesia dan Singapura, teori hubungan internasional dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan, masih jarang dilakukan.

Pada jurnal "The Impact of Kendal Industrial Park (Indonesia-Singapore Cooperation) in Economic Perspective" yang tulis oleh Nina Farliana, Khasan Setiaji, Inaya Sari Melati, Hanif Hardianto (2020) berfokus pada dampak ekonomi dari pengembangan KIK, hasil kerjasama Indonesia dan Singapura. Tesis utamanya adalah KIK berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur, yang memperkuat daya tarik investasi asing. Penelitian ini menggunakan kerangka pertumbuhan ekonomi, menekankan sinergi antara kebijakan pemerintah dan potensi lokal untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

Jurnal "Implikasi Foreign Direct Investment Singapura di Indonesia terhadap pengembangan kawasan industri (Studi Kasus: PT. Kawasan Industri Kendal)" yang ditulis oleh Rahayu Efendi (2020) membahas peran investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) dari Singapura dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia, khususnya KIK. Tesis utama jurnal ini adalah FDI Singapura secara signifikan mempercepat pembangunan kawasan industri melalui transfer teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan daya saing. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori FDI dan pertumbuhan ekonomi, di mana investasi asing dipandang sebagai katalisator untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.

Penelitian pada jurnal "Study of Community Perceptions of the Development of Kendal Industrial Area, Central Java Province" oleh Salsabila Laili Lam'aa' Sania, Ali Zainal Abidin (2023) meneliti persepsi masyarakat terkait pengembangan KIK di Jawa Tengah. Tesis utamanya adalah bahwa masyarakat mengakui manfaat ekonomi dari KIK, seperti peningkatan lapangan kerja, namun juga merasakan dampak negatif berupa polusi dan perubahan tata guna lahan. Jurnal ini menggunakan kerangka teori sosial dan pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan industri.

Pada jurnal "Cara Kerja Paradiplomasi: Pemerintah Kabupaten Kendal Berupaya Meningkatkan Investasi" oleh Reyva Alviona Fernanda Priskilla, Budi Setiyono, Muhammad Adnan (2024) membahas strategi paradiplomasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan investasi asing

di KIK. Tesis utama jurnal ini adalah strategi paradiplomasi, melalui kerja sama langsung dengan entitas bisnis internasional, berhasil menarik investasi asing. Penelitian ini menggunakan kerangka paradiplomasi dan hubungan internasional, menyoroti peran pemerintah daerah dalam diplomasi ekonomi.

Jurnal "Peran Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus dalam transformasi ekonomi: analisis strategis dan implementasi melalui matriks SWOT" oleh Sudati Nur Sarfiah, Yustirania Septiani, Rr. Retno Sugiharti (2023) membahas bagaimana status KIK sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berisikan rumusan strategi untuk pengembangan kawasan Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus dengan menggunakan matriks SWOT yang dibuat menggambarkan bagaimana strategi dapat diimplementasikan di masa depan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar studi mengenai KIK lebih banyak menyoroti dampak ekonomi, kontribusi terhadap investasi, strategi pembangunan kawasan, maupun persepsi masyarakat sekitar. Meski demikian, kajian yang menempatkan KIK dalam kerangka hubungan internasional, khususnya teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye, masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang secara langsung menghubungkan pola kerja sama lintas negara dan lintas aktor—seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta investor asing—dengan pencapaian tujuan pembangunan global. Padahal, keterlibatan Singapura dalam KIK tidak hanya menyangkut aliran investasi, tetapi juga mencerminkan adanya ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan dan memperkuat stabilitas

hubungan bilateral. Celah inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan mengkaji bagaimana KIK sebagai proyek kerja sama Indonesia–Singapura tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama mengenai pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melihat bagaimana KIK dapat menjadi contoh kerja sama internasional yang mendukung pembangunan daerah sekaligus membantu pengentasan kemiskinan.

1.5.2 Interdependensi Kompleks

Kerja sama Indonesia–Singapura dalam pembangunan KIK dapat dianalisis secara mendalam melalui perspektif complex interdependence atau interdependensi kompleks yang diperkenalkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1977). Teori ini hadir sebagai kritik terhadap paradigma realis yang menempatkan kekuatan militer sebagai penentu utama dalam hubungan internasional. Sebaliknya, Keohane dan Nye menegaskan bahwa hubungan antarnegara pada era modern semakin ditandai oleh keterhubungan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang melibatkan beragam aktor, baik negara maupun non-negara. Interdependensi ini tidak bersifat satu arah, melainkan timbal balik, sehingga setiap pihak memperoleh keuntungan sekaligus menanggung kerentanan dari keterhubungan tersebut.

Pembangunan KIK, keterhubungan ekonomi menjadi dimensi paling menonjol. Indonesia menyediakan lahan, tenaga kerja, regulasi, serta pasar domestik yang luas sebagai basis produksi. Di sisi lain, Singapura menawarkan modal finansial, teknologi industri, serta jaringan global yang memungkinkan

produk dari KIK terintegrasi ke pasar internasional. Pola ini menunjukkan keterikatan timbal balik: Indonesia membutuhkan investasi dan manajemen modern Singapura, sementara Singapura memerlukan lokasi strategis di Kendal untuk menopang ekspansi industrinya sekaligus mengatasi keterbatasan lahan domestik. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan KIK tidak mungkin dicapai tanpa kontribusi simultan kedua belah pihak.

Selain hubungan antarnegara, ciri khas interdependensi kompleks juga terlihat dari keterlibatan berbagai aktor non-negara. PT Jababeka Tbk sebagai pengembang kawasan, Sembcorp Development Ltd sebagai mitra internasional, investor multinasional, lembaga keuangan, serta masyarakat lokal dan UMKM merupakan bagian integral dari dinamika kerja sama ini. Peran aktor non-negara menunjukkan bahwa diplomasi dan hubungan internasional dewasa ini tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan berlangsung dalam ruang kolaboratif yang lebih luas. Pemerintah daerah Kendal juga memiliki kontribusi signifikan melalui kebijakan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penyediaan fasilitas pelatihan kerja. Hal ini mempertegas bahwa kerja sama internasional berlangsung pada berbagai level: pusat, daerah, dan global.

Dari sisi politik dan keamanan, keterikatan ekonomi yang lahir dari KIK menciptakan insentif bagi kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral. Ketergantungan ekonomi menurunkan kemungkinan terjadinya konflik karena masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk mempertahankan iklim kerja sama yang kondusif. Fenomena ini sesuai dengan tesis Keohane dan Nye bahwa dalam interdependensi kompleks, aspek militer tidak lagi dominan,

melainkan tergeser oleh kebutuhan menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, KIK tidak hanya berfungsi sebagai proyek pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang memperkuat ikatan bilateral Indonesia–Singapura.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup perubahan struktural dalam perekonomian, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Meier (2001) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses di mana tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat meningkat melalui pengelolaan sumber daya secara lebih efektif, sehingga memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Menurut World Bank (2018),

kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional, yakni USD 1,90 per hari berdasarkan daya beli. tingkat lokal, BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan nasional—termasuk kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

3. SDGs 1: No Poverty

SDGs nomor 1 (No Poverty) secara konseptual adalah komitmen global untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, yang dijabarkan ke dalam target-target operasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem (1.1), pengurangan kemiskinan menurut definisi nasional (1.2), perluasan perlindungan sosial (1.3), jaminan akses setara atas sumber daya ekonomi dan layanan dasar (1.4), penguatan ketahanan kelompok rentan terhadap guncangan (1.5), mobilisasi sumber daya, termasuk melalui kerja sama internasional (1.a), serta kebijakan pro-miskin yang sensitif gender (1.b). Kerangka ini menjadi landasan normatif untuk menilai program pembangunan, termasuk kolaborasi lintas-negara pada proyek kawasan industri, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga secara nyata menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, pemaknaan SDGs 1 merujuk pada agenda 2030 PBB dan ringkasan target-targetnya yang Anda uraikan pada bagian analisis skripsi, sehingga tujuan “tanpa kemiskinan” diposisikan sebagai sasaran payung yang menautkan dimensi ekonomi,

sosial, dan kelembagaan dari intervensi pembangunan. (United Nations, 2015)

4. Kawasan Industri

Kawasan industri secara konseptual adalah area yang diperuntukkan khusus bagi kegiatan industri dan dilengkapi dengan berbagai sarana, prasarana, serta fasilitas penunjang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan investasi. Di Indonesia, definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyebutkan bahwa kawasan industri merupakan kawasan yang dikelola oleh suatu badan usaha untuk menampung kegiatan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan penunjang. Kawasan industri dipandang sebagai instrumen penting dalam kebijakan pembangunan karena dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional (Sujatmiko, 2019).

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan secara konseptual dipahami sebagai suatu pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan secara seimbang. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh World Commission on Environment and Development (1987) melalui laporan *Our Common Future*, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (WCED, 1987). Pembangunan berkelanjutan kemudian dipertegas dalam Agenda 2030 for Sustainable Development yang memuat 17 tujuan global (SDGs), termasuk SDGs nomor 1: No Poverty, yang menargetkan penghapusan segala bentuk kemiskinan, perluasan akses layanan dasar, serta perlindungan kelompok rentan sebagai syarat utama tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (United Nations, 2015).

1.6.2 Definisi Operasional

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi akan diukur melalui perubahan struktur ekonomi daerah, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB, yang mencerminkan keberhasilan diversifikasi ekonomi (Kuncoro, 2012). Pembangunan ekonomi dapat diukur melalui persepsi masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan mereka, khususnya di sekitar KIK, serta kebijakan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Data kuantitatif akan diperoleh dari sumber-sumber seperti DPMPTSP dan publikasi pemerintah daerah. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal dan masyarakat setempat (Rondinelli, 1981).

2. Kemiskinan

Dalam penelitian ini, kemiskinan dioperasionalkan melalui dua indikator utama yang bersumber dari data BPS, yaitu tingkat kemiskinan

dan IPM Kabupaten Kendal. Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, sedangkan IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan menggunakan kedua indikator ini, penelitian dapat menilai sejauh mana pembangunan KIK dan kerjasama internasional dengan Singapura berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 1: Tanpa Kemiskinan di Kabupaten Kendal.

3. SDGs 1: No Poverty

Secara operasional dalam konteks penelitian ini, kontribusi hasil/Output kerja sama internasional pada proyek Kawasan Industri Khusus (KIK) terhadap SDGs 1 diukur dengan memetakan keluaran nyata proyek seperti investasi yang memicu penyerapan tenaga kerja formal, peningkatan pendapatan, penguatan akses perlindungan sosial bagi pekerja, perluasan akses atas peluang ekonomi melalui pelatihan vokasional, serta mobilisasi sumber daya dan kebijakan pendukung ke indikator-indikator SDGs 1 yang relevan. Indikator dampak yang digunakan meliputi tren penurunan tingkat kemiskinan daerah setelah KIK beroperasi (misalnya penurunan dari 11,37% pada 2016 menjadi 9,35% pada 2024), besaran lapangan kerja yang tercipta di KIK (>64.704 orang hingga Maret 2025) sebagai proksi peningkatan akses pekerjaan layak, bukti ketercakupannya perlindungan sosial bagi pekerja (BPJS), peningkatan pengeluaran per kapita sebagai proksi daya beli dan kesejahteraan (hingga Rp13,27 juta pada 2024), serta pemetaan capaian/ketidaktercapaian per target SDGs 1

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel evaluasi di Bab III. Dengan demikian, “kontribusi terhadap SDGs 1” dioperasionalkan sebagai perubahan terukur pada indikator-indikator tersebut yang secara logis dan empiris berkaitan dengan keluaran KIK, sekaligus mengakui area yang masih perlu penguatan seperti cakupan pengurangan kemiskinan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat dan kebijakan sensitif gender. (BPS Kendal, 2024)

4. Kawasan Industri

Kawasan industri dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui studi kasus Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai hasil kerjasama bilateral Indonesia–Singapura. KIK diukur berdasarkan beberapa indikator utama: pertama, pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas industri yang telah terealisasi; kedua, jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan; ketiga, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal, yang hingga Maret 2025 tercatat lebih dari 64 ribu orang; dan keempat, kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan di wilayah sekitar (Kendal Industrial Park, 2025). Dengan pengukuran tersebut, kawasan industri dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai area industri, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah yang mendukung pencapaian SDGs nomor 1: No Poverty.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam penelitian ini, pembangunan berkelanjutan dioperasionalkan sebagai keterkaitan langsung antara output kerjasama internasional dalam

pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi diukur melalui jumlah investasi yang masuk, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan pendapatan masyarakat. Aspek sosial dilihat dari kontribusi KIK dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal (misalnya penurunan dari 11,37% pada tahun 2016 menjadi 9,35% pada tahun 2024), pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan vokasional, serta penyediaan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Sementara aspek lingkungan dipertimbangkan melalui tata kelola kawasan industri yang memperhatikan regulasi lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan (BPS Kendal, 2024). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diukur melalui sejauh mana proyek KIK mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi kerentanan sosial masyarakat di sekitarnya.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan kerjasama internasional Indonesia dan Singapura dalam pembangunan KIK bisa dilihat dari hasil, bukan hanya dari proses diplomasi dan perjanjian politik. Hasil tersebut mencakup aspek ekonomi berupa masuknya investasi asing langsung dan pembangunan infrastruktur, aspek sosial berupa penciptaan lebih dari 64 ribu lapangan kerja serta penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal dari 11,37% pada 2016 menjadi 9,35% pada 2024, dan aspek kelembagaan melalui pembentukan regulasi serta program pelatihan vokasional yang meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia (BPS Kendal, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa output kerjasama internasional melalui KIK berkontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1: No Poverty, karena mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (United Nations, 2015).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, perilaku, atau pandangan partisipan dari perspektif mereka sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, yang dapat berupa wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan ini sering kali bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara mendalam sesuai dengan konteks penelitian. Creswell menekankan pentingnya aspek interpretatif dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berupaya memahami dan menafsirkan makna yang muncul dari interaksi dengan partisipan atau analisis teks (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah serta analisis dokumen kebijakan pemerintah dan laporan industri untuk mendukung data kualitatif.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis dan eksplanatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dengan menekankan pada proses, konteks, serta perspektif partisipan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin memahami fenomena kerja sama internasional antara Indonesia dan Singapura dalam pembangunan KIK, dengan memahami bagaimana pada makna, proses, serta keterlibatan berbagai aktor. Sementara itu, tipe deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara detail bentuk kerja sama yang terjalin, pola interdependensi yang terbentuk, serta implikasinya terhadap pembangunan daerah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pertama, yaitu pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini juga bersifat eksplanatif karena berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan KIK dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Neuman (2014), penelitian eksplanatif berfokus pada pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sebuah kejadian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pola kerja sama Indonesia–Singapura dalam KIK, tetapi juga menjelaskan bagaimana investasi asing dan keterlibatan sektor swasta dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat di mana proses penelitian dilakukan, yang dipilih berdasarkan relevansi dan kemampuannya untuk memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Creswell (2014), pemilihan situs penelitian harus mempertimbangkan kemudahan akses, relevansi dengan masalah penelitian, dan potensi untuk mendapatkan data yang kaya. Situs penelitian ini adalah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan fokus utama pada KIK sebagai objek utama penelitian. Lokasi ini dipilih karena KIK merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura yang menjadi contoh nyata penerapan interdependensi kompleks, serta memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, penelitian juga dilakukan di beberapa institusi penting yang berkaitan dengan data dan kebijakan, yaitu kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Kendal sebagai lembaga yang mengelola perizinan investasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal yang menyediakan data terkait Produk Domestik Regional Bruto, data kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang berperan dalam penyusunan regulasi dan dasar hukum investasi daerah. Pemilihan situs ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis bagaimana kerja sama internasional melalui KIK berkontribusi pada pembangunan daerah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin pertama tentang pengentasan kemiskinan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Miles dan Huberman (1994), subjek penelitian dipilih untuk memberikan perspektif yang kaya dan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Subjek penelitian ini meliputi aktor-aktor yang berperan langsung dalam pengembangan KIK. Pertama, PT Jababeka Tbk dari Indonesia dan Sembcorp Development Ltd dari Singapura sebagai pengembang utama kawasan industri yang menjadi motor kerja sama bilateral. Kedua, Pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berperan dalam perizinan investasi dan fasilitasi investor, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal yang menyusun regulasi terkait investasi daerah. Ketiga, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal, yang menyediakan data kuantitatif terkait indikator pembangunan, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan demikian, subjek penelitian ini mencakup kombinasi aktor pemerintah dan swasta yang memiliki peran strategis dalam kerja sama internasional Indonesia–Singapura melalui KIK.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang langsung berkaitan dengan KIK, seperti kebijakan, aturan, dan laporan perkembangan kawasan. Data ini dipilih karena bisa menunjukkan kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, data sekunder adalah data pelengkap yang diambil dari buku, jurnal, artikel, dan laporan dari berbagai lembaga. Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan dan

memperkuat analisis. Dengan adanya dua jenis data ini, penelitian tidak hanya menampilkan fakta yang ada, tetapi juga memiliki dasar teori yang kuat.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari dokumen resmi dan laporan yang dikeluarkan oleh PT Jababeka Tbk, Sembcorp Development Ltd, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal, Bagian Hukum Kabupaten Kendal, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel media, laporan pemerintah pusat dan daerah, serta publikasi lembaga internasional seperti UNDP. Semua sumber ini dipilih karena dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian tentang kerja sama Indonesia–Singapura dalam KIK dan kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pertama, yaitu pengentasan kemiskinan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan tahunan, regulasi daerah, serta publikasi dari PT Jababeka Tbk, Sembcorp Development Ltd, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal, Bagian Hukum Kabupaten Kendal, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal. Teknik ini dipilih karena dokumen-dokumen tersebut berisi informasi faktual yang diperlukan untuk melihat perkembangan dan dampak KIK. Kedua, studi pustaka, yaitu dengan membaca dan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel media, serta laporan dari lembaga nasional maupun internasional seperti UNDP. Studi pustaka membantu memperkuat analisis

dengan memberikan kerangka teori dan perspektif tambahan mengenai kerja sama internasional dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pertama tentang pengentasan kemiskinan. Dengan dua teknik ini, penelitian memiliki dasar yang kuat baik dari sisi data lapangan maupun teori.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer berasal dari dokumen resmi seperti laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, serta publikasi dari PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd. Data ini dianalisis untuk menggambarkan proses kerja sama internasional yang membentuk KIK serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Sementara itu, data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, serta laporan dari lembaga nasional maupun internasional seperti UNDP digunakan untuk memperkuat penjelasan dengan memberikan landasan teori dan perspektif tambahan.

Proses interpretasi dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan menyisihkan data yang tidak terkait langsung. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan data lapangan dengan teori interdependensi kompleks dari Keohane dan Nye. Dalam hal ini, data dari Bagian Hukum Kabupaten Kendal berperan penting untuk menunjukkan bagaimana regulasi daerah, seperti peraturan

investasi dan pemberian insentif, mendukung iklim kerja sama di KIK. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menyajikan fakta kerja sama Indonesia–Singapura dalam KIK, tetapi juga menafsirkan bagaimana aspek regulasi, investasi, dan pembangunan daerah berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin pertama tentang pengentasan kemiskinan.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini hanya mengambil data dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen dari PT Jababeka Tbk, Sembcorp Development Ltd, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal. Data sekunder dipilih dari literatur akademis, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional seperti UNDP yang memiliki kredibilitas tinggi. Serta dilakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai dokumen dan literatur guna melihat konsistensi informasi. Dengan cara ini, kualitas data penelitian dijaga agar tetap relevan, valid, dan mendukung analisis kerja sama Indonesia–Singapura dalam pengembangan KIK serta kontribusinya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) poin pertama, yaitu pengentasan kemiskinan.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan struktur sebagai berikut:

1. BAB 1: Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat dari penelitian atau kajian yang dilakukan.

2. BAB 2: Gambaran Umum

Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas mengenai topik yang dibahas, termasuk konteks atau kondisi umum yang menjadi fokus penelitian atau kajian.

3. BAB 3: Analisis

Bagian ini memuat pembahasan dan analisis terhadap permasalahan berdasarkan data, teori, dan argumen yang relevan. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. BAB 4: Penutup

Berisi kesimpulan hasil analisis yang menjawab tujuan penelitian atau kajian, saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh.